

**EFEKTIVITAS AKURASI DATA KELUARGA DALAM KETEPATAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA ASN DI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

**LIA LESTARI
NIM. 24.11.233459**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

RIWAYAT HIDUP

Lia Lestari Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Februari 1987 Anak kedua dari 2 (Dua) bersaudara,pasangan dari Bapak **Maman Susilo (Alm.)** dan **Ibu Eli Lestari**. Menikah dengan **Sunarja** dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni :

1. **Zulfadli Rahmat Winata**
2. **Zafira Berlina Winata**
3. **Zayn Pradipta Winata**

Riwayat Pendidikan

1. SDN TEGALHARJO Surakarta Lulus Tahun 1998
2. SLTPN 14 Surakarta Lulus Tahun 2001
3. SMA WARGA Surakarta Lulus Tahun 2024
4. STIE.ST.PIGNATELLI Surakarta Jurusan DIII Akuntansi Lulus Tahun 2007

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas akurasi data keluarga ASN terhadap ketepatan pembayaran tunjangan keluarga di BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan permasalahan utama masih terjadinya kelebihan pembayaran akibat data keluarga yang belum diperbarui secara optimal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembaruan data keluarga ASN telah berjalan melalui sistem terintegrasi (MyASN, SIASN, dan SIMPEG) dengan tingkat kepatuhan ASN yang cukup baik sehingga mendukung akurasi data dan ketepatan pembayaran tunjangan. Faktor pendukung meliputi kepatuhan ASN, sistem informasi terintegrasi, kelengkapan dokumen, sosialisasi, serta pengawasan rutin, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran sebagian ASN, keterlambatan dokumen, keterbatasan literasi digital, dan kendala teknis aplikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga akurasi data dan memastikan ketepatan pembayaran tunjangan keluarga ASN.

Kata kunci: Akurasi Data Keluarga, Tunjangan, Ketepatan Pembayaran.

SUMMARY

This study aims to analyze the effectiveness of family data accuracy of Civil Servants (ASN) on the accuracy of family allowance payments at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of East Kotawaringin Regency. The main problem in this research is the occurrence of overpayment of family allowances due to family data that has not been updated optimally. The research uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach through observation, interviews, and documentation, while data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques. The results show that the procedure for updating ASN family data has been implemented through integrated systems (MyASN, SIASN, and SIMPEG) with a relatively good level of ASN compliance, which supports data accuracy and the accuracy of allowance payments. Supporting factors include ASN compliance, integrated information systems, completeness of documents, socialization, and routine supervision, while inhibiting factors include low awareness of some ASN, delayed document submission, limited digital literacy, and technical application constraints. Therefore, the use of information technology, increased socialization, and continuous supervision are necessary to maintain data accuracy and ensure accurate family allowance payments.

Keywords: Family Data Accuracy, Allowance, Payment Accuracy.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi dengan judul: “EFEKTIVITAS AKURASI DATA KELUARGA DALAM KETEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA ASN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR” dapat di selesaikan dengan baik, Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik pada jenjang pendidikan sarjana. Penulis menyadari bahwa tersusunnya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Palangka Raya, 30 Maret 2026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritik.....	11
1. Teori Efektivitas.....	11
2. Teori Akurasi Data	13
3. Kajian Konseptual	16
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	37
F. Pengabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kondisi Obyektif Obyek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian	49
1. Efektivitas Akurasi Data Keluarga ASN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ditinjau Dari Kepatuhan ASN Dalam Memperbarui Data Keluarga.....	50
2. Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Hubungan Antara Akurasi Data Keluarga Dan Ketepatan Pembayaran Tunjangan Tersebut.....	81
C. Pembahasan.....	109
1. Efektivitas Akurasi Data Keluarga ASN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ditinjau Dari Kepatuhan ASN Dalam Memperbarui Data Keluarga.....	109
2. Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Hubungan Antara Akurasi Data Keluarga Dan Ketepatan Pembayaran Tunjangan Tersebut.....	144

BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	171

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 GAP Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang.....	24
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan itu, maka harus dilaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terdapat kebijakan Otonomi Daerah, yang artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Pemerintah Daerah.). Otonomi daerah ini menjadi ujung tombak dari kekuasaan yang sentralistik dan dianggap kurang aktual sehingga perlu adanya desentralisasi. Namun dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih banyak kekurangan dan dilakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang- undang ini terdapat kebijakan otonomi desa sehingga Undang-Undang ini dianggap lebih demokratis daripada Undang-Undang sebelumnya.

Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena sistem informasi yang baik dapat membuat kegiatan operasional instansi menjadi efektif dan efisien. Salah satunya adalah sistem informasi akuntansi yang dapat membantu menghasilkan suatu informasi yang berguna, dapat dipercaya, lengkap dan tepat. Hall menyatakan tiga tujuan dasar sistem informasi yaitu mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, mendukung operasional harian perusahaan. Jika sebuah instansi dapat menerapkan tujuan-tujuan tersebut dengan tepat maka akan dapat memperlancar kegiatan operasional instansi.

Pada instansi pemerintah, sistem informasi akuntansi memiliki fungsi yang krusial termasuk dalam pengelolaan informasi keuangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini khususnya di bidang komputer, menjadikan sistem informasi akuntansi dijalankan secara terkomputerisasi.. Sistem informasi berbasis komputer tersebut saat ini telah banyak digunakan di berbagai unit instansi pemerintah. Dalam pemanfaatannya, sistem komputerisasi memberikan banyak kelebihan diantaranya sebagai penunjang aktivitas dan kreativitas sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadikan instansi pemerintah mempunyai kapabilitas yang tinggi.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menunjang manajemen operasional yang baik, karena sumber daya manusia dalam suatu instansi merupakan faktor dominan dalam pencapaian tujuan instansi. Jika tidak ada sumber daya manusia, segala sumber daya yang tersedia tidak akan berjalan dengan lancar dan semestinya. Peran pegawai dalam sebuah instansi yaitu sebagai sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk menentukan kesuksesan sebuah instansi pemerintah, serta bertujuan untuk membantu mewujudkan produktivitas dan kinerja instansi. Pegawai dengan kesediaannya meluangkan tenaga, waktu, pikiran dan keterampilannya harus diapresiasi melalui imbalan jasa berupa gaji atau upah yang diberikan oleh instansi. Hall menyatakan upah adalah suatu imbalan dari perusahaan kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dirampungkan dan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan operasional perusahaan. Upah dinyatakan dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai. Maka, untuk menunjang kelancaran pemberian gaji kepada pegawai, instansi pemerintah membutuhkan sebuah sistem informasi yaitu disebut dengan sistem informasi akuntansi penggajian.

Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi yang terus mengalami kemajuan. Sistem informasi akuntansi penggajian mencakup hal-hal yang berhubungan dengan alur penggajian pegawai, meliputi pengelompokan gaji, fungsi-fungsi yang terkait dengan penggajian, prosedur-prosedur yang terkait dengan penggajian, dan dokumen- dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang proses penggajian pegawai. Setiap perusahaan atau instansi diberi kebebasan dalam menerapkan suatu sistem informasi akuntansi penggajian yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu bisa dengan sistem manual maupun berbasis komputer.

Salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Sistem tersebut diterapkan di BKAD untuk mengetahui daftar gaji maupun jumlah tunjangan pegawai, sehingga proses penggajian lebih efisien, mudah, dan akurat. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dan ketidakteraturan penggajian yang memicu kesalahpahaman antara instansi dengan pegawai, sehingga dampaknya akan menunjang kesejahteraan pegawai dan kapabilitas instansi.

Seringnya terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya yang dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), merupakan permasalahan administratif yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Tunjangan keluarga sebagai salah satu komponen penghasilan ASN diberikan berdasarkan data keluarga pegawai yang tercatat dalam sistem administrasi kepegawaian dan penggajian. Data tersebut meliputi status perkawinan serta jumlah anak yang menjadi tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keakuratan dan

keterbaruan data keluarga menjadi dasar utama dalam penetapan besaran tunjangan keluarga yang dibayarkan setiap bulan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat ASN yang belum secara optimal memperbarui data keluarga ketika terjadi perubahan kondisi keluarga. Perubahan status seperti perceraian, pernikahan, kelahiran anak, maupun anak yang telah melewati batas usia tanggungan atau sudah bekerja dan menikah, tidak selalu segera dilaporkan kepada perangkat daerah terkait. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian ASN terhadap pentingnya pembaruan data keluarga sebagai bagian dari kewajiban administratif. Akibatnya, data yang digunakan oleh BKAD Kotawaringin Timur sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan menjadi tidak sesuai dengan kondisi riil ASN yang bersangkutan.

Kurangnya kesadaran ASN dalam memperbarui data keluarga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman mengenai dampak langsung perubahan data keluarga terhadap perhitungan tunjangan, serta anggapan bahwa pembaruan data bersifat administratif semata dan tidak mendesak. Selain itu, sosialisasi terkait kewajiban pelaporan perubahan data keluarga belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada seluruh ASN. Dalam beberapa kasus, ASN baru menyadari pentingnya pembaruan data setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh pihak pengelola keuangan dan kepegawaian.

Di sisi lain, proses administrasi pembaruan data keluarga yang memerlukan kelengkapan dokumen pendukung dan tahapan tertentu juga menjadi kendala tersendiri. Bagi sebagian ASN, proses tersebut dianggap memerlukan waktu dan perhatian khusus, sehingga pembaruan data sering kali ditunda. Penundaan ini berdampak pada tidak sinkronnya data kepegawaian dengan sistem penggajian yang dikelola oleh BKAD

Kotawaringin Timur. Ketidaksesuaian data tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan keluarga yang seharusnya tidak lagi menjadi hak ASN.

Kelebihan pembayaran tunjangan keluarga yang terjadi secara berulang menimbulkan dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meskipun nilai kelebihan pembayaran pada masing-masing ASN relatif kecil, namun apabila terjadi secara terus-menerus dan melibatkan banyak pegawai, maka dapat berakumulasi menjadi potensi kerugian keuangan daerah. Selain itu, proses penertiban dan pengembalian kelebihan pembayaran membutuhkan upaya administrasi tambahan, baik bagi BKAD sebagai pengelola keuangan daerah maupun bagi ASN yang bersangkutan. Hal ini tentu mengurangi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan ini juga mencerminkan masih perlunya penguatan budaya tertib administrasi dan integritas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keakuratan data pribadi yang berdampak pada hak keuangan dan penggunaan anggaran daerah. Ketidakpatuhan dalam memperbarui data keluarga tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Oleh karena itu, seringkali terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga akibat kurangnya kesadaran ASN dalam memperbarui data keluarga di lingkungan BKAD Kotawaringin Timur perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan disiplin administrasi, serta penguatan sistem pengawasan dan verifikasi data kepegawaian. Dengan demikian, diharapkan pembayaran tunjangan keluarga dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu Penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS AKURASI DATA KELUARGA DALAM KETEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA ASN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”**

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Akurasi Data Keluarga ASN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditinjau dari kepatuhan ASN dalam memperbarui data keluarga?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi hubungan antara akurasi data keluarga dan ketepatan pembayaran tunjangan tersebut?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis Efektivitas akurasi data keluarga ASN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditinjau dari kepatuhan ASN dalam memperbarui data keluarga.
2. Untuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi hubungan antara akurasi data keluarga dan ketepatan pembayaran tunjangan tersebut.

Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran dan wawasan pengembangan ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para Mahasiswa dan Peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian terkait Efektivitas Akurasi Data Keluarga Terhadap Ketepatan Dalam Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi pemerintah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pelayanan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, digambarkan secara umum penyebab serta alasan-alasan yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Setelah itu, didefinisikan dan dirumuskan secara sistematis mengenai masalah yang akan dikaji.

BAB II Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas akurasi data keluarga terhadap ketepatan pembayaran tunjangan keluarga ASN, serta deskripsi teori yang meliputi konsep akurasi data, tunjangan keluarga ASN, dan ketepatan pembayaran. Bab ini juga memuat teori-teori pendukung yang berkaitan dengan

pengelolaan data kepegawaian dan efektivitas administrasi, serta diakhiri dengan penyusunan kerangka pikir penelitian sebagai dasar analisis hubungan antarvariabel yang diteliti.

BAB III metodologi penelitian Metode penelitian yang berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi gambaran umum penelitian. Hasil penelitian berisi data yang telah peneliti kumpulkan baik berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi dan diakhiri dengan analisis data terkait Efektivitas Akurasi Data Keluarga Terhadap Ketepatan Dalam Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB V Penutup, pada bagian bab ini yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah guna menjawab permasalahan penelitian dan saran-saran sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. Cambridge: MIT Press.
- Fadel, M. (2006). *Reinventing local government: Pengalaman dari daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto. (2015). *Analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Juran, J. M. (1992). *Juran on quality by design*. New York: Free Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2016). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V. (2015). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sellang, K. (2019). *Administrasi dan pelayanan publik*. Yogyakarta: Ombak.

- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2014). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tachjan. (2015). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Usman, H. (2014). *Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wang, R. Y. (1998). *Total data quality management*. Boston: MIT Press.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2015). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Andriani, D. (2020). Pengaruh sistem informasi kepegawaian terhadap akurasi data ASN. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Hidayat, R. (2019). Kepatuhan pegawai dalam administrasi kepegawaian pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Pratama, A. (2021). Efektivitas sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan kualitas data ASN. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1).
- Sari, M. (2022). Pengaruh akurasi data terhadap ketepatan pembayaran tunjangan ASN. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2).
- Wibowo, T. (2021). Implementasi e-government dalam pelayanan administrasi kepegawaian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Data Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sumber Internet

Badan Kepegawaian Negara. (2023). *Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)*. Jakarta: BKN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Kebijakan pengelolaan ASN*. Jakarta: Kemenpan RB.